



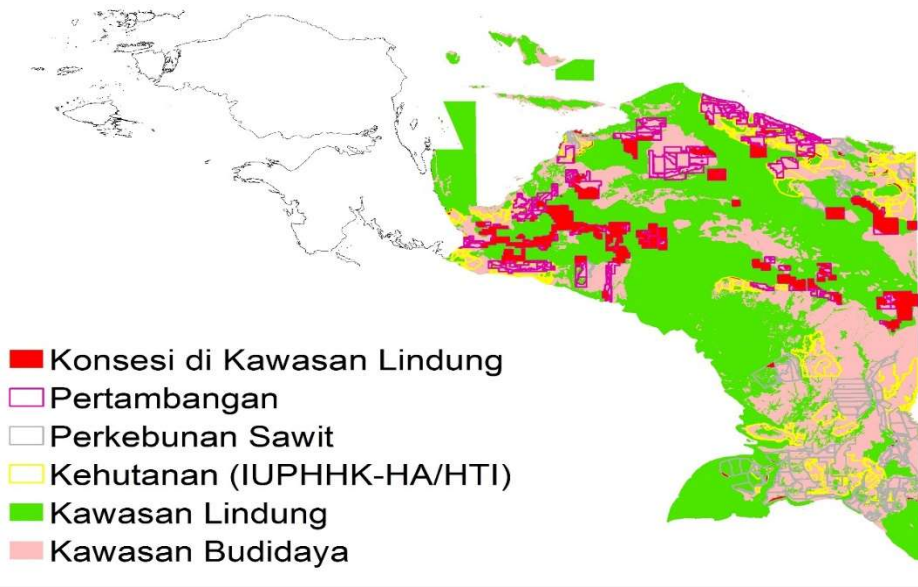
**Moratorium izin
Pertambangan, Perkebunan Sawit dan
Kehutanan di Provinsi Papua
(Menyelamatkan Hutan dan Masyarakat Adat Papua)**

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tata Ruang Papua (KMSTRP)

INTSIA, pt. PPMA, KIPRa, LBH Papua, JERAT Papua, TiKi, YADUPA, KP KC Sinode GKI di Tanah Papua,
SKP Fransiskan Jayapura, LP3AP, RMD, ALDP, SOS Tanah Papua

Fakta-Fakta

1. Tumpang Tindih Izin di Kawasan Lindung

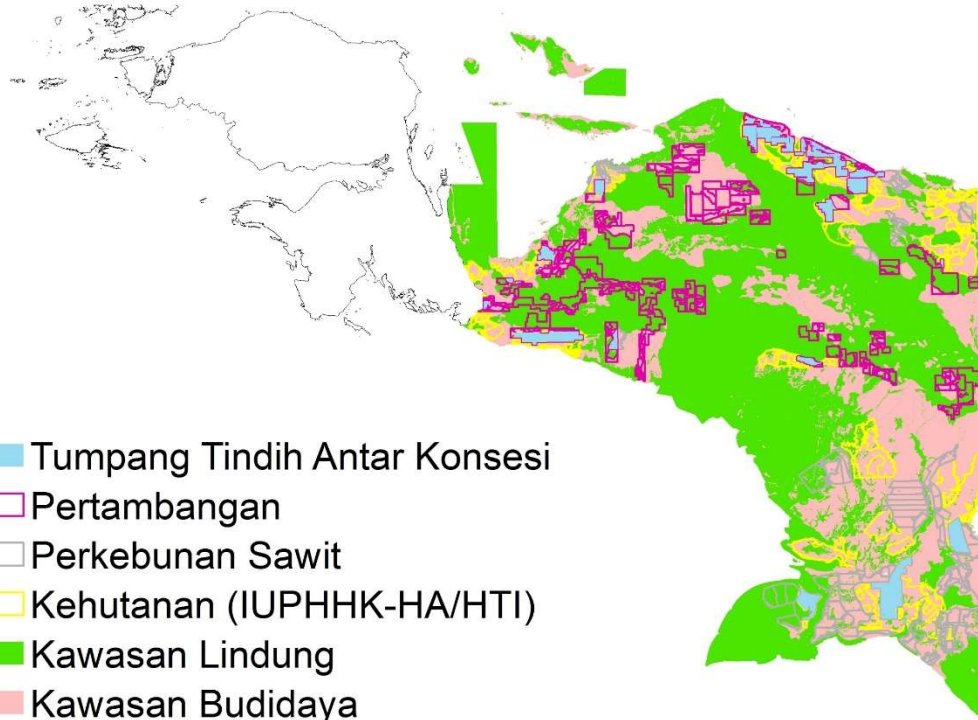


Sebanyak 103 izin investasi berbasis lahan tumpang tindih dengan kawasan lindung, terdiri dari 63 izin tambang, 21 izin sawit dan 19 Izin IUPHHK HA/HTI dengan luas 1.635.592,36 ha atau 11,08% dari luas total kawasan lindung di Provinsi Papua.

Tumpang Tindih Izin Pertambangan, Perkebunan Sawit dan Kehutanan di dalam Kawasan Lindung



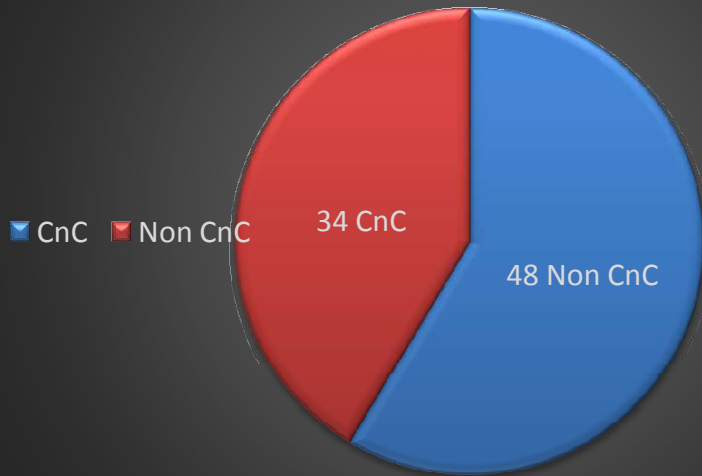
2. Tumpang Tindih Izin antar Konsesi



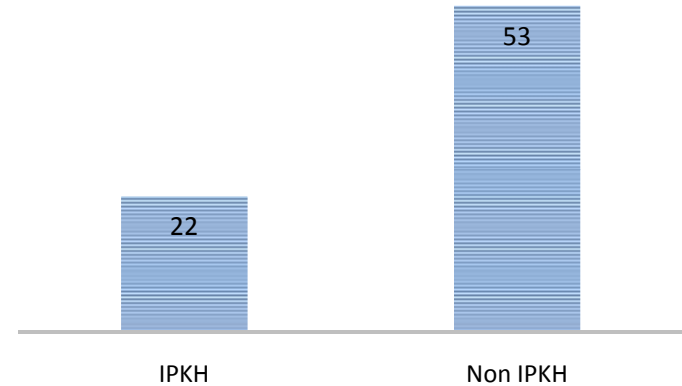
Izin Konsesi	Pertambangan (ha)	Perkebunan Sawit (ha)	Kehutanan (ha)
Pertambangan		50.424,19	595.346,36
Perkebunan Sawit	50.424,19		367,540.31
Kehutanan	595.346,36	329.593,23	

3. Izin Tidak Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan

Clear and Clean IUP di Provinsi Papua



STATUS IZIN PERKEBUNAN DIPROVINSI PAPUA



Izin Usaha Pertambangan (IUP)	Jumlah IUP	IPPKH	Tanpa IPPKH
Tambang Eksplorasi/studi Kelayakan	79	7	72
Tambang Eksploitasi/Produksi	3	-	3

Dari 79 IUP di Tanah Papua, hanya 11 IUP yang membayarkan Jaminan Reklamasi, sementara tak satupun pemilik IUP yang membayar Jaminan Pasca Tambang (Kementerian ESDM, 2018)

4. Potensi Kerugian Negara

The background of the slide features several stacks of Indonesian Rupiah banknotes. The most prominent are the 10,000 Rupiah notes, which are pink and white. There are also some 5,000 Rupiah notes visible. The stacks are arranged in a way that creates a sense of depth and volume, suggesting a large sum of money.

- Land rent dari izin pertambangan sebesar Rp. 94.649.501.520
- DR Rp. 800.158.159.130,40
- PSDH mencapai Rp. 486.868.721,16

5. Rendahnya Pendapatan Daerah

Sektor	Penerimaan	Tahun 2016	APBD 2016	% Terhadap APBD 2016	Tahun 2017	APBD 2017	% Terhadap APBD 2017	
Perkebunan	DBH Pajak	1.408.544.350	12.567.839.768.232	0,011%	1.035.030.150	13.006.812.664.926	0,008%	
Kehutanan	DBH Pajak	895.475.850		0,007%	826.065.350		0,006%	
	DBH SDA	14.656.009.749		0,117%	10.624.534.593		0,082%	
	- Iuran Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	4.085.854.882		0,033%	615.816.004		0,005%	
	- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	10.570.154.867		0,084%	6.390.179.135		0,049%	
	- Dana Reboisasi	-	0	3.618.539.454	0,028%			

6. Buruknya Transparansi Izin

- Proses tanpa PADIATAPA
- Keterbukaan Informasi Publik
- Kesulitan Akses Data

Contoh Kasus

Dalam 2 tahun terakhir terjadi sengketa informasi antara masyarakat dengan OPD yang berakhir pada putusan sidang Komisi Informasi. LBH Papua misalnya bersengketa informasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Papua terkait tidak diberikannya dokumen hak guna usaha (HGU) perkebunan sawit di Propinsi Papua yang dimohonkan LBH Papua. Setelah beberapa kali sidang di Komisi Informasi Propinsi (KIP) Papua, LBH Papua memenangkan sengketa dan KIP memerintahkan BPN untuk membuka seluruh dokumen HGU yang diminta LBH Papua pada 29 Mei 2018 dan KIPRa Papua tanggal 17 Desember 2018

7. Maraknya Konflik Tenurial



- 419 kasus konflik sumberdaya alam konflik terbesar berada di Kabupaten Mimika, Nabire, Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. (RPJMD Prov Papua 2018-2023)
- Di Kabupaten Keerom misalnya, terjadi konflik tenurial antara masyarakat adat Suku Merap dengan perusahaan sawit PTPN II.
- Contoh lain di Kab. Nabire, dimana masyarakat Suku Yerisiam Gua menggugat PT. Nabire Baru ke PTUN akibat)
- PT. Medco Papua Industri Lestari di Merauke yang beroperasi sejak tahun 2007 berkonflik dengan masyarakat di Distrik Kaptel Kabupaten Merauke akibat dari tidak diselesaikannya tuntutan ganti rugi lahan seluas 2.800 ha.

Riview Ijin PT. TSP dan PT. VCIWI

1. PT. TSP tidak melakukan kewajiban secara berkala secara terus menerus setiap tahunnya sebagaimana Pasal 53 ayat (2) PP 27 Tahun 2012.
2. Berdasarkan overlay peta konsesi PT TSP dengan peta pola ruang RTRW Provinsi Papua ada indikasi sekitar 500 ha masuk dalam kawasan hutan lindung
3. PT. VCIWI memiliki IUP tahun 2015, tidak beroperasi hingga sekarang
4. PT. VCIWI tidak melakukan laporan berkala

REKOMENDASI

1. Menerbitkan kebijakan penundaan izin baru pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan dalam bentuk Instruksi Gubernur dengan masa berlaku minimal 3 tahun.
2. Selama pelaksanaan kebijakan penundaan izin baru diberlakukan, pemerintah Provinsi Papua membentuk tim evaluasi yang terdiri dari OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan perwakilan masyarakat adat, untuk mengevaluasi seluruh izin-izin pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan (*existing permits*) di Provinsi Papua.
3. Hasil evaluasi tim tersebut digunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua sebagai dasar untuk menata izin, mencabut izin yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperbaiki sistem perizinan yang terintegrasi, transparan, partisipatif dan akuntabel